



Optimalisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (Doka) Terhadap Pembangunan Di Aceh Barat

Ulvi Yuranda, Cut Asmaul Husna

Universitas Teuku Umar, Alue Penyareng, Ujong Tanah Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

ARTICLE INFORMATION

Received: November 20, 2021
 Revised: Desember 10, 2021
 Accepted: January 02, 2022
 Available online: January 31, 2022

KEYWORDS

West Aceh, DOKA, Otsus, Implementation, Government

CORRESPONDENCE

Phone: +6282369482023
 E-mail: ulviyurd@gmail.com

A B S T R A C T

Aceh is one of the provinces that has become an area with large balancing funds through the allocation of special additional funds to finance development activities. The purpose of this study was to determine the use of the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) in development of Aceh Barat Regency and to determine whether development through DOKA had a significant impact on development in Aceh Barat Regency. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study can be concluded that the Optimization of the Special Autonomy Fund for Aceh (DOKA) for Development in Aceh Barat Regency in 2019-2022 has a significant impact on development in Aceh Barat Regency, such as in the construction of a ring road in Aceh Barat Regency which aims to open economic access for people in remote areas.

PENDAHULUAN

Aceh salah satu Provinsi yang menjadi daerah dengan perolehan dana perimbangan besar melalui pengalokasian dana tambahan khusus dalam membiayai terhadap kegiatan pembangunan (Andriyani & Juliansyah, 2018). Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam jangka waktu 20 tahun, tahun pertama sampai kelima belas dana Otsus ialah 2% dari Plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Setelah itu, di tahun kelima belas sampai kedua puluh ialah 1% dari Plafon DAU Nasional (Mediyanti, 2019). Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ialah penerimaan dari Pemerintah Aceh dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, sosial dan kesehatan, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan (Hartati, 2016) dalam (Taurina et al., 2019)

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) juga memiliki peranan untuk mendanai kebutuhan pemerintah sehari-hari ataupun memberi lebih baik pelayanan terhadap masyarakat (Mafruhat, 2021). Pemberian Otonomi Khusus atau Daerah Istimewa sesungguhnya ialah bentuk desentralisasi asimetris sebagai pola relasi unik antara daerah karena sebab-sebab khusus dan pemerintah pusat (Cahyono, 2016). Di tahun yang sama setelah Aceh, Papua juga mendapatkan status Otonomi Khusus lewat UU 21 tahun 2001 (Suharyo, 2018) dalam (Akbar et al., 2021)

Pada tahun 2020 berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Aceh menempati persentasi dengan tingkat kemiskinan tertinggi urutan ke enam dari daerah lainnya di Indonesia, penduduk miskin memiliki persentase ialah 15,43%. Sehingga dapat dikatakan Dana Otonomi Khusus yang diberi oleh Pemerintah Pusat masih belum mampu dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh (Adnan, 2021)

Sejalannya dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan pendapatan juga relatif tinggi di Aceh (Amri, 2017a) dalam (Muliadi & Amri, 2019). Jumlah Dana Otsus yang telah diterima sangat besar jumlahnya yang dapat digunakan untuk pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan di Aceh (Alfiady & Dewi, 2019). Seiring dengan adanya pemberlakuan status Otonomi Khusus, Aceh juga menerima Alokasi Dana Khusus yang digunakan untuk membiayai percepatan pembangunan di Aceh (Putra, 2014)

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi adalah mengacu kepada tindakan tujuan-tujuan dalam penetapan suatu keputusan. Tindakan tersebut mengubah keputusan-keputusan serta menjadi pola-pola operasional demi mencapai perubahan-perubahan kecil atau besar sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya bahwa implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Selama tahun 2019-2022 penganggaran program di kegiatan DOKA Kabupaten Aceh Barat lebih fokus kepada

bentuk/bidang infrastruktur. Sedangkan untuk bidang ekonomi atau sektor yang menyentuh langsung alokasi penganggaran masih kecil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti seberapa besar kontribusi Alokasi dana DOKA dalam pembangunan Aceh Barat dalam rangka Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Aceh Barat Tahun 2019-2022.

Heru Cahyono (2012), mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan otonomi khusus pemerintah Aceh masih belum maksimal dalam pengelolaannya, seperti dalam bidang ekonomi belum berjalan sebagaimana semestinya, hal ini membuat pembangunan yang ada di Aceh tidak merata, ini membuat kesejahteraan rakyat Aceh tidak meningkat. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat pengelolaan dana otsu belum maksimal dalam pengelolaannya hal itu membuat pembangunan di Aceh tidak merata.

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat serta ingin mengetahui apakah rencana pembangunan melalui dana DOKA memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Aceh Barat, mengingat pada tahun 2020 adanya pandemi virus corona covid-19.

METODE

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Lexy J. Moloeng (2007:6) memaknai bahwa penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek penelitian. Lebih cocok serta pas digunakan dalam meneliti hal-hal berkaitan penelitian sikap.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menumpulkan dokumen data Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terhadap pembangunan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2020 dan melakukan wawancara dengan pegawai Bappeda Kabupaten Aceh Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum adanya pemekaran, Aceh Barat mempunyai dengan luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha. Setelah terjadinya pemekaran luas wilayah 2.927,95 km² kemudian pada akhir tahun 2019 memiliki sebanyak 210.113 jiwa.

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) adalah dana yang di gunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dan juga membiayai program sesuai dengan prioritas Provinsi Aceh, lalu ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan , terdapat beberapa hal yang dibahas tentang Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Terhadap Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi dana otonomi khusus Aceh terhadap pembangunan di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data, berikut rekapan data Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut;

Tabel.1.2 Rekapitulasi dana otonomi khusus Aceh terhadap pembangunan di Kabupaten Aceh Barat

No	Bidang	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Jumlah
1	Infrastruktur	53.280.094.255	49.634.198.200	59.368.100.188	62.878.321.880	225.160.714.523
2	Ekonomi	14.050.000.000	6.147.396.963	-	-	20.197.396.963
3	Budaya	38.355.754.681	39.051.628.165	31.967.438.563	33.857.557.935	109.374.821.409
Total						354.732.932.895

Sumber: Bappeda Aceh Barat

Berdasarkan pada tabel diatas, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) bidang infrastruktur fokus pada pembangunan jalan dengan jumlah alokasi anggaran Rp. 225.160.714.523, pada bidang sosbud berjumlah Rp. 109.374.821.409, selanjutnya pada bidang ekonomi ialah Rp. 20.197.396.963 dan Alokasi Doka Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2019-2022 fokus pada tiga bidang yaitu bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosbud.

Kemudian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun 2020 *refocusing* sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dengan Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat berwenang di Bappeda Aceh Barat mengatakan bahwa drna tersebut di *refocusing* karena adanya perubahan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk menjaga kualitas dalam memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 serta menghadapi ancaman perekonomian Nasional dan sistem Keuangan.

Adapun menurut pejabat yang berwenang di Bappeda Aceh Barat ialah selama pembangunan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2022 mempunyai dampak yang signifikan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, karena dengan adanya dana DOKA proses pembangunan di Aceh Barat, khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat semakin mudah di wujudkan seperti pembangunan jalan lingkaran Kabupaten Aceh Barat yang kini dapat membuka akses bagi perekonomian masyarakat di daerah terpencil.

- b. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Anggaran	
Realisasi	
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan Jalan	25,629,357,700.00
Pembangunan Jembatan	5,278,491,130.00
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	953,861,000.00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan	1,211,750,241.00
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	942,093,400.00
Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	988,298,000.00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	4,769,104,921.00

Sumber: Bappeda Aceh Barat

- c. Rekapitulasi Rancangan Belanja Menurut Uruusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Rancangan Belanja Menurut Uruusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Anggaran	
Realisasi	
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan Jalan	12,354,000,000.00
Pembangunan Jembatan	28,000,198,200.00
Pengembangan Rumah Sehat Sederhana	7,225,000,000.00
Pengadaan Armada Pemadam Kebakaran	1,500,000,000.00
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	1,000,000,000.00

Sumber: Bappeda Aceh Barat

Berdasarkan tabel Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di atas Alokasi DOKA Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2020 terealisasi pada bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, rehabilitasi jalan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana persampahan, pembangunan pos pemadam kebakaran, pembangunan rumah sehat sederhana dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Optimalisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Aceh Barat di tahun 2019-2022 mempunyai dampak yang signifikan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, seperti dalam pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Aceh Barat yang bertujuan untuk membuka akses perekonomian masyarakat di daerah terpencil.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Cut Asmaul Husna, MM Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing saya selama proses magang dan memberikan arahan serta ilmu dalam mengerjakan Penulisan Karya Ilmiah sebagai syarat kelulusan Sastra Satu (S1).
2. Ibu Amelia Rostina, S.Si Selaku Supervisor magang yang telah membimbing dan memberikan ilmu dalam proses magang berlangsung.

REFERENSI

Adnan. (2021). PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH 2008-2019. *JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH*, 11.

Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas*, 7(1), 101-120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>

Alfiady, T., & Dewi, R. (2019). OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN DI ACEH : Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. 9(1), 38-60.

Andriyani, D., & Juliansyah, H. (2018). Analisis Disparitas Wilayah di Provinsi Aceh: Telaah pada Dana Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(2003), 100-107. <https://core.ac.uk/download/pdf/230118507.pdf>

Cahyono, H. (2016). Gagal Menyejahterakan Rakyat. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 1-22.

Mafruhah, A. A. D. R. A. Y. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Journal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(1), 75-81.

Mediyanti, S. (2019). Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), 56-60. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>

Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>

Putra, E. J. (2014). Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 421-435. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6039>

Taurina, M., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 32-47. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13821>

Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 (Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 050/1115/2020)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Otsus Alokasi Kab/Kota Tahun Anggaran 2021

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Usulan Perbaikan Hasil Pembahasan DOKA Tahun 2022
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rekapitulasi Rancangan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020